

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan LKjIP

Pemerintah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (**result oriented government**). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi.

SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Penyelenggaran SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Sesuai siklusnya, setelah selesai pelaksanaan anggaran dan kegiatan, entitas akuntabilitas satuan kerja, entitas akuntabilitas unit kerja, dan entitas akuntabilitas kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, menyusun laporan kinerja tahunan atau lebih dikenal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah wajib menyusun LKjIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan kembali instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem perencanaan dan pelaporan yang berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan dan kinerja dengan waktu penyusunan yang berbeda sesuai siklusnya. Oleh karena itu dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, RKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKjIP 2018.

LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang **Dokumen Perjanjian Kinerja** merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali;
3. bahan penyusunan rencana program/kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun berikutnya.

1.2. Gambaran Pemerintah Kabupaten Boyolali

Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari organisasi perangkat daerah beserta tugas dan fungsi dan aspek strategis Pemerintah Kabupaten Boyolali.

1.2.1 Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dibentuk untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam menjalankan pemerintahan yang menjadi urusan daerah. Meskipun Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah (20), yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Dinas Sosial;
 - 6) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 7) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 11) Dinas Perhubungan;
 - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 13) Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
 - 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 15) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 17) Dinas Pertanian;
 - 18) Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - 19) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - 20) Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Badan Daerah (3), yang terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Badan Keuangan Daerah;
 - 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, masih melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah diundangkan, ada 5 (lima) terdiri dari :
- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Simo; dan
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris.
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- i. Kecamatan (22), yaitu Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambi, Kecamatan Simo, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, Kecamatan Karanggede, Kecamatan wonosegoro, Kecamatan Kemosu, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gladagsari, dan Kecamatan Wonosamodro.
- j. Kelurahan (6), yaitu Kelurahan Siswodipuran, Kelurahan Pulisen, Kelurahan Banaran, Kelurahan Sambeng, kelurahan Mojosongo, dan Kelurahan Kemiri.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar OPD dan Tugasnya

No.	Nama SKPD	Tugas
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
2.	Sekretariat DPRD	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
3.	Inspektorat	Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
5.	Dinas Kesehatan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
8.	Dinas Sosial;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
10.	Dinas Ketahanan Pangan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan

No.	Nama SKPD	Tugas
1	2	3
11.	Dinas Lingkungan Hidup;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
14.	Dinas Perhubungan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik
16.	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal, dan urusan energi dan sumber daya mineral
18.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan dan olah raga, dan pariwisata
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan
20.	Dinas Pertanian;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian
21.	Dinas Peternakan dan Perikanan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian sub peternakan dan bidang kelautan dan perikanan

No.	Nama SKPD	Tugas
1	2	3
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian
23.	Satuan Polisi Pamong Praja	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja dan kebakaran
24.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah
25.	Badan Keuangan Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah
26.	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah
27.	RSUD Pandan Arang	membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan
28.	RSUD Banyudono	Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan
29.	RSUD Simo	Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Membantu Bupati dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana
31.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi

1.2.2 Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah, terletak antara $110^{\circ} 22'$ - $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 7'$ - $7^{\circ} 36'$ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 - 1500 meter di atas permukaan laut. Nama resmi Kabupaten Boyolali dengan ibu kota Boyolali. Luas wilayah Kabupaten Boyolali 101.510,1955 ha (1.008,45 Km²) terdiri dari 22,49% berupa lahan basah dan 77,51% berupa tanah kering.

Secara wilayah administrasi terdiri dari 22 Kecamatan, 6 kelurahan, dan 261 desa. Letak geografis Kabupaten Boyolali berada pada tiga kota besar yang lebih dikenal dengan Joglosemar (Jogjakarta, Solo, dan Semarang). Jarak bentang Barat - Timur sepanjang 48 Km dan jarak Utara – Selatan sepanjang 54 Km. Batas wilayah Kabupaten Boyolali:

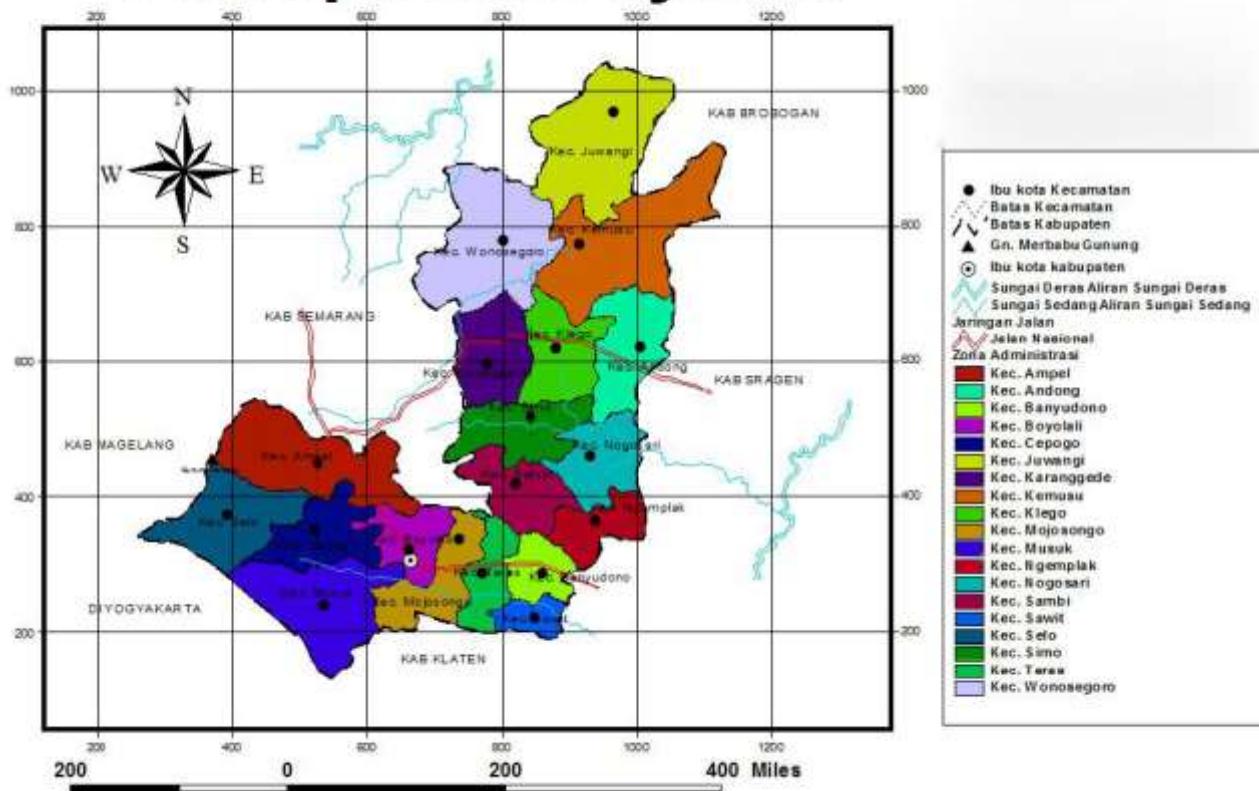
- Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
- Timur : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo
- Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Klaten dan DIY
- Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang

Bagian timur laut sekitar wilayah Kecamatan Karanggede dan Simo pada umumnya tanah lempung. Bagian tenggara sekitar wilayah Kecamatan Banyudono dan Sawit pada umumnya tanah geluh. Bagian barat laut sekitar wilayah Kecamatan Musuk dan Cepogo pada umumnya tanah berpasir. Bagian utara sepanjang perbatasan dengan wilayah kabupaten Grobogan pada umumnya tanah berkapur. Secara topografi wilayah mulai dari ketinggian 75 m diatas permukaan laut di wilayah bagian timur hingga 1.500 m diatas permukaan laut di wilayah bagian barat.

Di wilayah Kabupaten Boyolali terdapat 2 buah gunung menjadi ikon Kabupaten Boyolali, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Keduanya ada di wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Tamansari, dan Ampel yang merupakan wilayah bagian barat-selatan. Adanya kedua gunung tersebut menyebabkan perbedaan kondisi fisik lahan, hasil tanaman, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi fisik wilayah selatan pegunungan di bagian barat dan kearah timur melandai melewati Kota Boyolali hingga bagian timur berupa tanah yang relatif datar berupa sawah. Jenis tanah berpasir mempunyai porositas tinggi sehingga tanah lebih banyak mangandung air tanah yang lebih banyak. Di wilayah selatan-timur banyak terdapat banyak mata air dan sungai yang selalui mengalir airnya. Hasil bumi yang banyak diwilayah ini adalah tanaman sayuran dan tembakau di wilayah selatan-barat (pegunungan) dan padi di wilayah selatan timur. Di wilayah ini juga terdapat banyak tempat usaha/ industri menengah dan besar. Kemudahan akses jalan dan prasarana, ketersediaan air, dan kestabilan lahan merupakan penyebab tumbuhnya tempat usaha/ industri di wilayah selatan. Sedangkan wilayah utara sebagian besar mempunyai jenis tanah kapur dan atau lempung, sebagian besar tanah berupa lahan kering. Hasil utama wilayah tersebut adalah hasil huta (terutama kayu) dan tanaman palawija.

Peta Administrasi Kabupaten Boyolali



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Boyolali

Berikut beberapa keunggulan Kabupaten Boyolali yang dapat memberikan gambaran sekilas Kabupaten Boyolali yang menonjol :

1. Inovasi

Kabupaten Boyolali meraih penghargaan bergengsi Innovative Government Award (IGA) 2017. Diseleksi dari seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Tanah Air, Kabupaten Boyolali meraih peringkat keenam dari 10 Kabupaten nominator. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Seno yang diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam agenda Malam Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif/ IGA Tahun 2017 dan Leadership Award di Puri Agung Convention Hall Hotel Sahid Jaya Jakarta. Inovasi daerah yang dilakukan pemda ini dapat berbentuk, inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya. Hal tersebut harus sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Terdapat tiga aspek penilaian yang membuat Boyolali meraih skor 2124 ini. Aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek manfaat yang didasarkan pada lima kriteria inovasi daerah. Kriteria tersebut yakni pembaharuan, memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat dan tidak membebani atau memberikan pembatasan pada masyarakat. Kemudian merupakan urusan pemda dan yang terakhir dapat direplikasi. Pelaksanaan IGA ini sendiri melalui serangkaian tahapan, mulai dari penjaringan profil inovasi daerah pada bulan Agustus. Kemudian dilanjutkan verifikasi sebulan selanjutnya. Diteruskan dalam proses validasi pada Oktober-November melalui presentasi kepala daerah dan temuan lapangan.

2. Peternakan

Boyolali dikenal sebagai kota susu, karena merupakan salah satu sentra terbesar penghasil susu sapi segar di Jawa Tengah. Peternakan sapi perah umumnya berada di daerah selatan dan dataran tinggi yang berudara dingin, karena sapi perah yang dikembangkan saat ini berasal dari wilayah sub-stropolis Australia dan Selandia Baru. Selain itu susu dapat diolah menjadi keju oleh pabrik keju asal Boyolali yaitu keju Indrakila, didaerah Kecamatan Ampel juga terdapat sentra industri Abon dan Dendeng.

Sapi asal negara Belanda yang dibawa oleh penjajah Belanda. Sapi tersebut budidayakan di Indonesia, sejak tahun 1980 Pemerintah Indonesia menyalurkan kredit usaha pertenakan sapi perah (FH). Sejak itulah di Kabupaten Boyolali menjadi produksi susu : 120.000 liter/ hari. Kabupaten Boyolali merupakan penghasil susu untuk tingkat propinsi jawa Tengah kurang lebih 50 % berasal dari Kabupaten Boyolali.

3. Perikanan

Kampung Lele terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit. Kampung lele merupakan usaha kementerian perikanan Indonesia untuk memenuhi target sebagai penghasil perikanan terbesar. Pembudidayaan ikan lele di Kampung Lele dianggap berhasil memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan baik lokal (Boyolali, Solo, dan Yogyakarta) maupun nasional. Bahkan keberhasilan pembudidayaan ikan lele di kampung lele tidak hanya dikenal di skala nasional, melainkan hingga kawasan Asia Tenggara. Desa Tegalrejo dicanangkan menjadi Kampung Lele oleh Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto pada Bulan Juni 2006, kemudian dikunjungi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Selain sebagai perikanan, Desa Tegalrejo (kampung lele) juga menyediakan jasa wisata yakni berupa wisata melihat langsung proses pembibitan, pemberian makan, hingga memanen ikan lele (bisa juga merasakan memanen ikan lele secara langsung), mengunjungi tempat pembuatan abon, kripik dan rambak yang semuanya dari ikan Lele.

4. Industri mikro kecil menengah

Dukuh Tumang, Desa/ Kecamatan Cepogo merupakan sentra penghasil produk kerajinan tembaga dan kuningan yang sudah terkenal baik di tingkat lokal maupun regional atau mancanegara. Karena, komoditas itu merupakan unggulan dari Kabupaten Boyolali. Jenis yang dihasilkan sangat beragam antara lain, lampu hias, relief, bak mandi, kaligrafi, tempat buah, vas bunga, dan aksesoris lainnya. Produksi ini melalui eksportir sebagaimana sudah diekspor ke beberapa negara antara lain Belanda, Perancis, Korea, Amerika Serikat, dan Canada. Desa Cepogo meruakan jalur wisata Solo-Selo-Borobudur (SSB), sehingga sering dilewati atau dikunjungi oleh turis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan, para tamu dari dans atau instansi untuk studi banding, magang atau sekaligus. Selain itu, ada industri yang juga merupakan ikon Boyolali yaitu industri minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan salah satu komoditas unggulan yang berkualitas ekspor. Jenis atsiri yang dikembangkan di wilayah Boyolali, antara lain bunga kenangan, nilam, ilang-ilang, dan daun cengkeh. Desa Bendo Kecamatan Banyudono merupakan penghasil minyak atsiri kenangan, karena di daerah itu banyak ditanam pohon kenangan, di mana dahulu masyarakat hanya mengenal bungan kenangan sebagai bungan tabur, akan tetapi setelah melalui proses penyulingan dapat dibuat sebagai minyak atsiri yang memiliki nilai produksi jauh lebih tinggi. Minyak atsiri nilam dan ilang-ilang diproduksi di Desa jelok, kecamatan Cepogo dan minyak daun cengkeh banyak diproduksi di Desa Musuk, Kecamatan Musuk. Sebagian besar minyak atsiri dijual melalui eksportir baik dari Kota Surabaya, Yogyakarta, dan Malang untuk negara tujuan Perancis, Singapura, dan USA.

5. Pariwisata

Boyolali terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang memiliki pemandangan sangat indah dan mempesona, sayuran hijau yang luas dan berbukit-bukit serta aktivitas Gunung Merapi yang terlihat dengan jelas aliran lahar dan asapnya. Jalur Solo-Boyolali-Cepogo-Selo-Borobudur (SSB) yang melintasi kedua gunung tersebut dipromosikan menjadi jalur wisata menarik yang menjadi pilihan bagi wisatawan baik domestik maupun negara asing dari kota budaya Surakarta menuju Candi Borobudur untuk melintasi Kabupaten Boyolali. Kecamatan Selo dikenal sebagai daerah peristirahatan sementara bagi para pendaki Gunung Merapi dan Merbabu yang mempunyai tempat penjualan cenderamata yang representatif. Kecamatan Cepogo dan Selo merupakan sentra penghasil sayuran hijau yang segar dan murah serta pusat kerajinan tembaga di Boyolali.

Selain panorama Gunung Merapi dan Merbabu, kabupaten Boyolali juga memiliki tempat wisata berupa mata air alami yang mengalir secara terus menerus dan sangat jernih yang dikelola dengan baik menjadi tempat wisata air, kolam renang, kolam pancing dan restoran seperti di Tlatar (sekitar 7 km arah utara kota Boyolali) dan Pengging di Kecamatan Banyudono (sekitar 10 km arah timur kota Boyolali). Kedua tempat wisata air ini memiliki keunikan sendiri-sendiri. Kalau di Tlatar memiliki keunggulan di mana lokasinya masih sangat luas dan memiliki beberapa pilihan kolam renang berikut tempat mancing dan restoran terapung, maka di Pengging memiliki keunggulan di mana dulunya merupakan tempat mandi keluarga Kasunanan Surakarta . Sehingga disekitar Pengging ini masih dapat ditemukan bangunan-bangunan bersejarah yang unik milik Kasunanan Surakarta. Juga terdapat makam salah seorang pujangga Keraton Surakarta yaitu Raden Ngabehi Yosodipuro. dan masih ada lagi waduk sidorejo (WKS) yang tak kalah menarik dengan Waduk Kedung Ombo (WKO) yang pasnya terletak Dusun Sidorjo, Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dan disini bisa menikmati pemandangan yang luar biasa.

6. Potensi Pertanian/ Pangan

Dengan potensi dan kondisi lahan yang subur maka Boyolali mempunyai banyak keunggulan baik komoditas pertanian dan produk pangan yang spesifik meliputi pertanian pangan, ternak sapi perah, sapi potong, jagung hibrida, hortikultura sayuran dan buah buahan dan ikan khususnya ikan lele dengan julukan kampung lele dan menjadi unggulan Nasional sebagai kawasan minapolitan.

Sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB terbesar yaitu mencapai rata-rata sekitar 35,6 % dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,76 % .

Dengan besarnya potensi dan keunggulan sektor tersebut, maka kabupaten Boyolali telah menempatkan sektor pangan dan pertanian menjadi sektor unggulan dan komitmen ini telah dituangkan dalam rancangan RPJMD 2016 – 2021, khususnya pada misi ke 5 yaitu menjadikan Boyolali sebagai lumbung padi dan lumbung pangan nasional.



Gambar 1.2 Unggulan Kabupaten Boyolali

1.2.3 Aspek Strategis Kabupaten Boyolali

Aspek strategis Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tersebut dalam dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Aspek Geografi dan Demografis

a. Aspek Geografi

Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah karena berada pada segitiga wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang merupakan tiga kota utama di wilayah Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikembangkannya wisata Solo-Selo (Kabupaten Boyolali)-Borobudur (Kabupaten Magelang) atau SSB, diharapkan lebih meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Boyolali. Disamping itu, seiring dengan mulai perencanaan pembangunan jalan tol Solo-Semarang dan jalan tol Solo-Kertosono yang melintasi wilayah Kabupaten Boyolali, maka diharapkan potensi pengembangan Kabupaten Boyolali, terutama dalam sektor perekonomian dan industri menjadi sangat besar.

b. Aspek Demografi

Pada tahun 2019 jumlah penduduk menjadi 930 531 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 459 044 jiwa dan perempuan sebanyak 471 487 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 949 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun 0,43%. Pengelompokan penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penataan jumlah angkatan kerja penduduk yang umurnya adalah usia di atas 15 tahun sampai dengan dibawah 64 tahun atau yang dikenal dengan usia produktif. Pada gilirannya usia produktif tersebut akan berkurang perkembangannya tiap tahun karena sejumlah penduduk melanjutkan sekolah dan sejumlah penduduk terserap pada lapangan kerja, selisihnya dikenal dengan angka pengangguran.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan daerah adalah PDRB, pada tahun 2016 sampai dengan 2018, PDRB atas dasar konstanta di Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan dari 19 trilyun rupiah menjadi 22 trilyun rupiah. Kabupaten Boyolali memiliki PDRB yang cukup besar jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan laju inflasi Kabupaten Boyolali dari Tahun 2019 terlihat fluktuatif dan masih dibawah 0.5% setiap bulannya. Secara umum faktor yang mempengaruhi inflasi salah satunya adalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan kenaikan tersebut sangat berpengaruh terhadap sebagian besar harga komoditi barang dan jasa di pasaran. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk menunjang kelestarian dan kesinambungan pembangunan di segala bidang pada suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) tahun terakhir (periode 2016-2018) naik 1,04 poin. Hal ini merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Boyolali yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan daya ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

b. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan yang secara ekplisit bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di tingkat nasional.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Boyolali Tahun 2016 sebanyak 117.000 atau sebesar 12,09%, tahun 2017 sebanyak 116.400 atau sebesar 11,96% dan tahun 2018 sebanyak 98.23 atau sebesar 10,04%. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,05%. Penurunan angka kemiskinan yang signifikan dalam suatu daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam upaya kesejahteraan masyarakat.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga. Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, gambaran data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kabupaten Boyolali. Dalam rangka pembinaan dan fasilitasi grup kesenian, Pemerintah Kabupaten Boyolali menyediakan tempat sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga.

3. Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah, Rasio guru/murid.

2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Pelayanan di RSUD Boyolali juga telah memenuhi standar akreditasi 16 (enam belas) Pokja.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan pembangunan bidang pekerjaan umum dengan indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Panjang jalan, Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk, Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk, Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat. Dan indikator pembangunan urusan penataan ruang adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, dan Bangunan ber-IMB.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten. Dalam rangka peningkatan perumahan layak huni bagi masyarakat, Pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana guna pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan secara terus menerus.

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pemahaman Kewaspadaan Nasional, Pemahaman Wawasan Politik, Bela Negara, Pemerintahan Umum, Pengawasan Orang Asing, Konflik Sosial, Deteksi Dini, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Pangan dan Kerukunan Umat Beragama.

6) Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, Karang Taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.

b. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Pelaksanaan urusan tenaga kerja diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Boyolali terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Perkembangan penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari indikator rasio KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

3) Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

4) Pertanahan

Perkembangan data pertanahan dapat dilihat pada indikator Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan dan Meningkatnya permasalahan pertanahan yang diselesaikan.

5) Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan wajib lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, dan tersedianya ruang terbuka hijau. Terciptanya lingkungan bersih tersebut telah dibuktikan dengan adanya perolehan adipura 13 kali berturut-turut. Sedangkan upaya untuk peningkatan kepedulian dunia industri, Pemerintah Kabupaten Boyolali memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang peduli terhadap lingkungan.

6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio kepemilikan dokumen kependudukan terus meningkat.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat yang merupakan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka partisipasi terhadap program yang diselenggarakan oleh berbagai Perangkat Daerah dilakukan melalui strategi pendampingan secara konseptual.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Boyolali sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan indikator rata-rata jumlah jiwa per keluarga dan cakupan peserta KB aktif.

9) Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.

10) Komunikasi dan Informatika

Pengkajian dan penelitian bidang informasi, penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bisa memberikan informasi kebijakan dan pembangunan kepada masyarakat.

11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan perkoperasian Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 secara umum meningkat baik dari kondisi koperasi aktif, jumlah koperasi jumlah anggotanya maupun volume usahanya. Sehingga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan lagi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

12) Penanaman Modal

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Nilai investasi Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 secara umum mengalami peningkatan, meskipun penambahan jumlah investor setiap tahunnya bersifat fluktuatif. Hal-hal yang mempengaruhi investasi adalah pertumbuhan penduduk, inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan.

14) Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik digambarkan dengan keberadaan/terpublikasinya data-data di Kabupaten Boyolali dalam bentuk buku.

15) Persandian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Kegiatan bidang persandian yang telah dilaksanakan di lingkungan Setda Kabupaten Boyolali.

16) Kebudayaan

Beberapa indikator pengelolaan potensi budaya di Kabupaten Boyolali adalah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali), Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

17) Perpustakaan

Guna meningkatkan minat baca masyarakat dan pelajar di Kabupaten Boyolali, Pemerintah senantiasa menambah koleksi bahan pustaka, yang meliputi buku fiksional, majalah dan referensi. Disamping penambahan koleksi tersebut, peningkatan koleksi buku elektronik atau dikenal dengan E-book juga terus ditambah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau membaca buku secara online. Pembenahan dan peningkatan fasilitas di perpustakaan daerah juga ditingkatkan sehingga kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah pun semakin meningkat.

18) Kearsipan

Indikator pembangunan urusan karsipan adalah Cakupan pengelolaan arsip secara baku, dan Persentase Perangkat Daerah menerapkan arsip secara baik.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Indikator pembangunan urusan peternakan dan perikanan adalah Produksi perikanan, Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nelayan, dan Produksi perikanan kelompok nelayan.

2) Pariwisata

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Boyolali.

3) Pertanian

Indikator kinerja pembangunan pertanian di Kabupaten Boyolali adalah Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan Cakupan bina kelompok petani.

Kabupaten Boyolali merupakan penghasil daging sapi terbesar tingkat Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 13% sampai dengan 17%, dari data di atas kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir produksi daging mengalami penurunan yang disebabkan oleh tingginya harga sapi dan persaingan dengan daging impor. Produksi susu Kabupaten Boyolali rata-rata selama 5 (lima) tahun sebesar 50.184 ribu liter per tahun merupakan produsen susu terbesar tingkat Jawa Tengah, dengan kontribusi lebih dari 50% terhadap produksi Jawa Tengah. Permasalahan yang masih dijumpai adalah rendahnya produktifitas ternak dan kualitas susu.

4) Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Boyolali sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi hutan produksi dan hutan rakyat. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui kegiatan penanaman/pengkayaan hutan rakyat, penghijauan lingkungan dan pembangunan bangunan sipil teknis, konservasi tanah dan air (sumur resapan, *gully plug* dan dam penahan) baik secara sipil teknis, vegetatif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Upaya pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi sebagai sumber energi alternatif di Kabupaten Boyolali, yang dapat dikembangkan antara lain pada potensi Sumber Energi Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dan Ratio Elektrifikasi.

6) Perdagangan

Kecenderungan ekspor bersih mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.

7) Perindustrian

Pertumbuhan industri kecil dan rumah tangga relatif kecil.

8) Transmigrasi

Penempatan transmigrasi selama beberapa tahun ini mengalami penurunan.

d. Fungsi Penunjang

1) Perencanaan

Keberhasilan dapat dilihat dengan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali

2) Keuangan

Administrasi Keuangan Kabupaten Boyolali telah mendapat Opini WTP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tahun 2019 merupakan tahun kedelapan memperoleh WTP dari BPK. Opini WTP yang diberikan BPK memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah di Boyolali telah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Hal ini merupakan wujud penghargaan dan komitmen Pemerintah kepada seluruh kementerian, lembaga negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang laporan keuangannya sudah diperiksa BPK dan mendapat status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Prioritas pemanfaatan aset daerah difokuskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan aset daerah dilakukan secara periodik antara lain melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah, inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset serta penyelesaian kasus/sengketa.

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan sumber daya aparatur merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja aparatur. Pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efisiensi kinerja, serta produktifitas kinerja pegawai agar pegawai dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Dalam upaya meningkatkan efisiensi kinerja, serta produktivitas kinerja aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan serta pembinaan-pembinaan terhadap pegawai. Peningkatan kapasitas SDM aparatur antara lain dilaksanakan melalui pengiriman PNS untuk tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis, dan pengembangan karier PNS melalui promosi terbuka dan *assessment center* pegawai.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang dijabarkan melalui beberapa tahapan *road map*. Dalam rangka perwujudan *good governance* telah

disusun disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali 2014-2019. Reformasi Birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif).

4) Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Perlunya pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

e. Fungsi Lainnya

1) Kesekretariatan DPRD

Untuk mendukung peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat, maka Kesekretariatan DPRD sangat berperan dalam terlaksananya layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.

2) Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Administratif dan Pelayanan

Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat serta mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat perlu adanya kebijakan.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan dapat menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi maupun kapasitas fiskal.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan mudah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menerapkan sistem perijinan secara online, sehingga untuk mendapatkan perijinan dapat dilaksanakan secara cepat dan mudah.

3) Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap pelaksanaan pemerintahan baik secara keuangan maupun secara fisik. Penghapusan terhadap Perjalanan Dinas bagi Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan ke daerah menjadi terobosan baru guna menghilangkan beban pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Pelaporan Harta Kekayaan ASN maupun Pejabat Negara melalui Laporan LHKASN dan LHKPN telah terlaksana 100%. Hal tersebut merupakan prestasi yang membanggakan. Pengawasan juga dilakukan dengan cara pelarangan terhadap segala bentuk penerimaan gratifikasi dan pembentukan Tim Saber pungli guna menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Gelar Pengawasan Daerah dilaksanakan satu tahun sekali, dimana dalam kegiatan tersebut memberikan penghargaan kepada Pegawai dan Perangkat Daerah yang berprestasi.

- 4) Administrasi Umum pada Semua Perangkat Daerah

Untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan dalam pembangunan daerah, maka administrasi umum sangat diperlukan demi kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Administrasi umum pada semua Perangkat Daerah meliputi kegiatan rutin yang ada di setiap Perangkat Daerah.
4. Aspek Daya Saing Daerah
 - a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Boyolali tingkat pendapatan masyarakat tercermin dari PDRB per kapita.
 - b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Boyolali, fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya:

 - 1) Perhubungan

Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan yang lebih baik.
 - 2) Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian yang mendukung pariwisata di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun selalu meningkat, diantaranya dengan semakin bertambahnya para pelaku usaha pariwisata yaitu restoran, rumah makan dan hotel.
 - 3) Jaringan Listrik

Untuk itu telah diupayakan agar setiap desa terdapat jaringan listrik yang dapat mensuplai kepada setiap rumah tangga, namun belum semua rumah tangga di setiap desa dapat teraliri listrik.
 - c. Fokus Iklim Berinvestasi

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - d. Fokus Sumber Daya Manusia

Perkembangan rasio angka ketergantungan yang mempunyai makna penduduk usia kerja masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

1.3. Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan LKjIP
- 1.2. Gambaran Pemerintah Kabupaten Boyolali
- 1.3. Sistematika Penyajian LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Kinerja
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Penilaian Kinerja
- 3.3. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Simpulan
- 4.2. Saran

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.
- B. Matrik RPJMD keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Strategis Daerah Kabupaten Boyolali 2016-2021.
- C. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.
- D. Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Boyolali Tahun 2019.
- E. Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019.
- F. Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019.
- G. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019.